

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

I. Tujuan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
- 2) Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan; dan
- 3) Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

II. Ruang Lingkup

- 1) Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- 2) Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi).
- 3) Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
- 4) Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD.

III. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu:

- 1) Basis akrual untuk LO, Neraca dan LPE; dan
- 2) Basis kas untuk LRA, LAK dan LPSAL.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

- I. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

- II. Secara spesifik, tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
- 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- III. Laporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
- 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
- IV. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
- 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Pembiayaan;
 - 7) Saldo Anggaran Lebih;
 - 8) Pendapatan-LO;
 - 9) Beban; dan
 - 10) Arus Kas.
- V. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- VI. Pemerintah Daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian

mengenai keluaran (*output* entitas) dan hasil (*outcomes*) dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

C. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan beradapada pimpinan entitas.

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

I. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- 1) LRA;
- 2) LPSAL;
- 3) Neraca;
- 4) LO;
- 5) LAK;
- 6) LPE; dan
- 7) CaLK.

II. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali LAK dan LPSAL yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

E. STRUKTUR DAN ISI

I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- 1) LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
- 2) LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LRA;
 - b) Belanja;
 - c) Surplus/Defisit-LRA;
 - d) Pembiayaan; dan
 - e) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- 3) LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- 4) Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan LRA sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
|--|----------|-----------|---|-----------|
| PENDAPATAN | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah* | | | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| Lain - lain PAD yang sah | | | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN (7) | | | | |
| BELANJA | | | | |
| BELANJA OPERASI | | | | |
| Belanja Pegawai | | | | |
| Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| Jumlah Belanja Operasi | | | | |
| BELANJA MODAL | | | | |
| Belanja Modal Tanah | | | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | | |
| Belanja Modal Aset Lainnya | | | | |
| Jumlah Belanja Modal | | | | |
| JUMLAH BELANJA | | | | |
| | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT | | | | |

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SKPKD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| Uraian | (Dalam Rupiah) | | | |
|--|----------------|-----------|---|-----------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| PENDAPATAN | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | | | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| Lain - lain PAD yang sah | | | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |
| Dana Bagi Hasil | | | | |
| Dana Alokasi Umum | | | | |
| Dana Alokasi Khusus - Fisik | | | | |
| Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | |
| Dana Insentif Daerah | | | | |
| Dana Otonomi Khusus | | | | |
| Dana Keistimewaan | | | | |
| Dana Desa | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | | | | |
| Bantuan Keuangan | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah | | | | |
| Total Pendapatan Transfer | | | | |
| LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | |
| Pendapatan Hibah | | | | |
| Pendapatan Dana Darurat | | | | |
| Pendapatan Lainnya | | | | |
| Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| BELANJA | | | | |
| BELANJA OPERASI | | | | |
| Belanja Pegawai | | | | |
| Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| Belanja Bunga | | | | |
| Belanja Subsidi | | | | |
| Belanja Hibah | | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | | |
| Jumlah Belanja Operasi | | | | |
| BELANJA MODAL | | | | |
| Belanja Modal Tanah | | | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | | |
| Belanja Modal Aset Lainnya | | | | |
| Jumlah Belanja Modal | | | | |
| BELANJA TAK TERDUGA | | | | |
| Belanja Tak Terduga | | | | |
| Jumlah Belanja Tak Terduga | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| BELANJA TRANSFER | | | | |
| Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | | | | |
| Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi | | | | |
| Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota | | | | |
| Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | | | | |
| Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota | | | | |
| Jumlah Belanja Transfer | | | | |
| JUMLAH BELANJA | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT | | | | |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| Penggunaan SILPA | | | | |
| Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat | | | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain | | | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank | | | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) | | | | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya | | | | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) | | | | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | | | | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| PEMBIAYAAN NETTO | | | | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | | | |

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| Uraian | (Dalam Rupiah) | | |
|--|----------------|-----------|-------------|
| | Anggaran | Realisasi | % Realisasi |
| PENDAPATAN | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | | | |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | |
| Lain - lain PAD yang sah | | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | |
| Dana Bagi Hasil | | | |
| Dana Alokasi Umum | | | |
| Dana Alokasi Khusus - Fisik | | | |
| Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | |
| Dana Insentif Daerah | | | |
| Dana Otonomi Khusus | | | |
| Dana Keistimewaan | | | |
| Dana Desa | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil | | | |
| Bantuan Keuangan | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah | | | |
| Total Pendapatan Transfer | | | |
| LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | |
| Pendapatan Hibah | | | |
| Pendapatan Dana Darurat | | | |
| Pendapatan Lainnya | | | |
| Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | | |
| BELANJA | | | |
| BELANJA OPERASI | | | |
| Belanja Pegawai | | | |
| Belanja Barang dan Jasa | | | |
| Belanja Bunga | | | |
| Belanja Subsidi | | | |
| Belanja Hibah | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| Jumlah Belanja Operasi | | | |
| BELANJA MODAL | | | |
| Belanja Modal Tanah | | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| Belanja Modal Aset Lainnya | | | |
| Jumlah Belanja Modal | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| BELANJA TAK TERDUGA | | | | |
| Belanja Tak Terduga | | | | |
| Jumlah Belanja Tak Terduga | | | | |
| BELANJA TRANSFER | | | | |
| Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi | | | | |
| Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa | | | | |
| Jumlah Belanja Transfer | | | | |
| JUMLAH BELANJA | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT | | | | |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| Penggunaan SILPA | | | | |
| Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat | | | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain | | | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank | | | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) | | | | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya | | | | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) | | | | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | | | | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| PEMBIAYAAN NETTO | | | | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | | | |

II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- 1) LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a) SAL awal;
 - b) Penggunaan SAL;
 - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 - e) Lain-lain; dan
 - f) SAL akhir.
- 2) Di samping itu, Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CaLK. Format LPSAL mengacu pada contoh format perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, namun demikian format tersebut dapat diubah sesuai kebutuhan apabila ada transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format laporan tersebut. Contoh format LPSAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN SALDO LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| Uraian | (Dalam Rupiah) | |
|---|----------------|------|
| | 20X1 | 20X0 |
| Saldo Anggaran Lebih Awal | | |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | | |
| Subtotal | | |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | | |
| Subtotal | | |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | | |
| Lain-lain | | |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | | |

III. Neraca

- 1) Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 2) Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

- 3) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- 4) Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
 - a) kas dan setara kas;
 - b) investasi jangka pendek;
 - c) piutang;
 - d) persediaan;
 - e) investasi jangka panjang;
 - f) aset tetap;
 - g) aset lainnya
 - h) kewajiban jangka pendek;
 - i) kewajiban jangka panjang; dan
 - j) ekuitas.
- 5) Format Neraca mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format neraca dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format neraca tersebut. Contoh format Neraca sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SKPD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| (Dalam Rupiah) | | |
|--|------|------|
| Uraian | 20X1 | 20X0 |
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas dan Setara Kas | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| Piutang Pajak* | | |
| Piutang Retribusi | | |
| Piutang Lainnya | | |
| Penyisihan Piutang | | |
| Beban Dibayar Dimuka | | |
| Persediaan | | |
| Jumlah Aset Lancar | | |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | | |
| Peralatan dan Mesin | | |
| Gedung dan Bangunan | | |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| Aset Tetap Lainnya | | |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | | |
| Akumulasi Penyusutan | | |
| Jumlah Aset Tetap | | |
| ASET LAINNYA | | |
| Tagihan Jangka Panjang | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| Tuntutan Ganti Rugi | | |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | |
| Aset Tak Berwujud | | |
| Aset Lain - lain | | |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | | |
| Jumlah Aset Lainnya | | |
| JUMLAH ASET | | |
| KEWAJIBAN | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | | |
| Utang Belanja | | |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | |
| EKUITAS | | |
| EKUITAS | | |
| Surplus/Defisit-LO | | |
| Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | |

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SKPKD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| | (Dalam Rupiah) | |
|---|----------------|------|
| Uraian | 20X1 | 20X0 |
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas dan Setara Kas | | |
| Kas di Kas Daerah | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| Kas Lainnya | | |
| Setara Kas | | |
| Investasi Jangka Pendek | | |
| Piutang Pajak | | |
| Piutang Retribusi | | |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | | |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | | |
| Piutang Transfer Antar Daerah | | |
| Piutang Lainnya | | |
| Penyisihan Piutang | | |
| Beban Dibayar Dimuka | | |
| Persediaan | | |
| Aset Untuk Dikonsolidasikan | | |
| Jumlah Aset Lancar | | |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| Investasi Non Permanen | | |
| Investasi kepada BUMN | | |
| Investasi kepada BUMD | | |
| Investasi dalam Obligasi | | |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | | |
| Dana Bergulir | | |
| Jumlah Investasi Non Permanen | | |
| Investasi Permanen | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | |
| Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| Jumlah Investasi Permanen | | |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang | | |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | | |
| Peralatan dan Mesin | | |
| Gedung dan Bangunan | | |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| Aset Tetap Lainnya | | |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | | |
| Akumulasi Penyusutan | | |
| Jumlah Aset Tetap | | |

| | | |
|--|--|--|
| DANA CADANGAN | | |
| Dana Cadangan | | |
| Jumlah Dana Cadangan | | |
| ASET LAINNYA | | |
| Tagihan Jangka Panjang | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| Tuntutan Ganti Rugi | | |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | |
| Aset Tak Berwujud | | |
| Aset Lain - lain | | |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | | |
| Jumlah Aset Lainnya | | |
| JUMLAH ASET | | |
| KEWAJIBAN | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| Utang Bunga | | |
| Utang Pinjaman Jangka Pendek | | |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | | |
| Utang Belanja | | |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| Utang kepada Pemerintah Pusat | | |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bank | | |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |
| Utang kepada Masyarakat (Obligasi) | | |
| Premium (Diskonto) Obligasi | | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | |
| EKUITAS | | |
| EKUITAS | | |
| Surplus/Defisit-LO | | |
| JUMLAH EKUITAS | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | |

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| (Dalam Rupiah) | | |
|---|------|------|
| Uraian | 20X1 | 20X0 |
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas dan Setara Kas | | |
| Kas di Kas Daerah | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| Kas di BLUD | | |
| Kas Dana BOS | | |
| Kas Dana Kapitasi pada FKTP | | |
| Kas Lainnya | | |
| Setara Kas | | |
| Investasi Jangka Pendek | | |
| Piutang Pajak | | |
| Piutang Retribusi | | |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | | |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | | |
| Piutang Transfer Antar Daerah | | |
| Piutang Lainnya | | |
| Penyisihan Piutang | | |
| Beban Dibayar Dimuka | | |
| Persediaan | | |
| Jumlah Aset Lancar | | |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| Investasi Non Permanen | | |
| Investasi kepada BUMN | | |
| Investasi kepada BUMD | | |
| Investasi dalam Obligasi | | |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | | |
| Dana Bergulir | | |
| Jumlah Investasi Non Permanen | | |
| Investasi Permanen | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | |
| Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| Jumlah Investasi Permanen | | |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang | | |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | | |
| Peralatan dan Mesin | | |
| Gedung dan Bangunan | | |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| Aset Tetap Lainnya | | |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | | |
| Akumulasi Penyusutan | | |
| Jumlah Aset Tetap | | |

| | | |
|--|--|--|
| DANA CADANGAN | | |
| Dana Cadangan | | |
| Jumlah Dana Cadangan | | |
| ASET LAINNYA | | |
| Tagihan Jangka Panjang | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| Tuntutan Ganti Rugi | | |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | |
| Aset Tak Berwujud | | |
| Aset Lain - lain | | |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | | |
| Jumlah Aset Lainnya | | |
| JUMLAH ASET | | |
| KEWAJIBAN | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| Utang Bunga | | |
| Utang Pinjaman Jangka Pendek | | |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | | |
| Utang Belanja | | |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| Utang kepada Pemerintah Pusat | | |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bank | | |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |
| Utang kepada Masyarakat (Obligasi) | | |
| Premium (Diskonto) Obligasi | | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | |
| EKUITAS | | |
| EKUITAS | | |
| JUMLAH EKUITAS | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | |

IV. Laporan Operasional

- 1) LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos tidak terduga, pos tidak terduga, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
- 2) LO dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- 3) Dalam LO harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) cakupan entitas pelaporan;
 - c) periode yang dicakup;
 - d) mata uang pelaporan; dan
 - e) satuan angka yang digunakan.
- 4) LO menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - b) Beban dari kegiatan operasional;
 - c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 - d) Kegiatan Non Operasional;
 - e) Surplus/defisit sebelum Pos Tidak Terduga;
 - f) Pos Tidak Terduga, dan
 - g) Surplus/defisit-LO.
- 5) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE
- 6) Format LO mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format tersebut. Contoh format LO adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|------|------|------------------------|---|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | |
| <u>PENDAPATAN</u> | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah* | | | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| <u>BEBAN</u> | | | | |
| BEBAN OPERASI | | | | |
| Beban Pegawai | | | | |
| Beban Barang dan Jasa | | | | |
| Jumlah Beban Operasi | | | | |
| BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | | | | |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | | | | |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | | | | |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | | |
| Beban Penyusutan Aset Lainnya | | | | |
| Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | | | | |
| Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi | | | | |
| JUMLAH BEBAN | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT LO | | | | |

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| (Dalam Rupiah) | | | | |
|--|------|------|------------------------|---|
| Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ Penurunan | % |
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | |
| PENDAPATAN | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | | | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| Lain - lain PAD yang sah | | | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |
| Dana Bagi Hasil | | | | |
| Dana Alokasi Umum | | | | |
| Dana Alokasi Khusus - Fisik | | | | |
| Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | |
| Dana Insentif Daerah | | | | |
| Dana Otonomi Khusus | | | | |
| Dana Keistimewaan | | | | |
| Dana Desa | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil | | | | |
| Bantuan Keuangan | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah | | | | |
| Total Pendapatan Transfer | | | | |
| LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | |
| Pendapatan Hibah | | | | |
| Pendapatan Dana Darurat | | | | |
| Pendapatan Lainnya | | | | |
| Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| BEBAN | | | | |
| BEBAN OPERASI | | | | |
| Beban Pegawai | | | | |
| Beban Barang dan Jasa | | | | |
| Beban Bunga | | | | |
| Beban Subsidi | | | | |
| Beban Hibah | | | | |
| Beban Bantuan Sosial | | | | |
| Jumlah Beban Operasi | | | | |
| BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | | | | |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | | | | |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | | | | |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | | |
| Beban Penyusutan Aset Lainnya | | | | |
| Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | | | | |
| Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| BEBAN TRANSFER | | | | |
| Beban Bagi Hasil | | | | |
| Beban Bantuan Keuangan | | | | |
| Jumlah Beban Transfer | | | | |
| BEBAN TAK TERDUGA | | | | |
| Beban Tak Terduga | | | | |
| Jumlah Beban Tak Terduga | | | | |
| JUMLAH BEBAN | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | | | | |
| <u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u> | | | | |
| SURPLUS NON OPERASIONAL | | | | |
| Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar | | | | |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | | | |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | | |
| Jumlah Surplus Non Operasional | | | | |
| DEFISIT NON OPERASIONAL | | | | |
| Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar | | | | |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | | | |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | | |
| Jumlah Defisit Non Operasional | | | | |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | | | |
| <u>POS LUAR BIASA</u> | | | | |
| PENDAPATAN LUAR BIASA | | | | |
| Pendapatan Luar Biasa | | | | |
| Jumlah Pendapatan Luar Biasa | | | | |
| BEBAN LUAR BIASA | | | | |
| Beban Luar Biasa | | | | |
| Jumlah Beban Luar Biasa | | | | |
| POS LUAR BIASA | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT LO | | | | |

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| (Dalam Rupiah) | | | | |
|--|------|------|------------------------|---|
| Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ Penurunan | % |
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | |
| PENDAPATAN | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | | | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| Lain - lain PAD yang sah | | | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |
| Dana Bagi Hasil | | | | |
| Dana Alokasi Umum | | | | |
| Dana Alokasi Khusus - Fisik | | | | |
| Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | |
| Dana Insentif Daerah | | | | |
| Dana Otonomi Khusus | | | | |
| Dana Keistimewaan | | | | |
| Dana Desa | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil | | | | |
| Bantuan Keuangan | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah | | | | |
| Total Pendapatan Transfer | | | | |
| LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | |
| Pendapatan Hibah | | | | |
| Pendapatan Dana Darurat | | | | |
| Pendapatan Lainnya | | | | |
| Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| BEBAN | | | | |
| BEBAN OPERASI | | | | |
| Beban Pegawai | | | | |
| Beban Barang dan Jasa | | | | |
| Beban Bunga | | | | |
| Beban Subsidi | | | | |
| Beban Hibah | | | | |
| Beban Bantuan Sosial | | | | |
| Jumlah Beban Operasi | | | | |
| BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | | | | |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | | | | |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | | | | |
| Beban Penyusutan Jalan, Ingasi, dan Jaringan | | | | |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | | |
| Beban Penyusutan Aset Lainnya | | | | |
| Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | | | | |
| Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi | | | | |
| BEBAN TRANSFER | | | | |
| Beban Bagi Hasil | | | | |
| Beban Bantuan Keuangan | | | | |
| Jumlah Beban Transfer | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| BEBAN TAK TERDUGA | | | | |
| Beban Tak Terduga | | | | |
| Jumlah Beban Tak Terduga | | | | |
| JUMLAH BEBAN | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | | | | |
| <u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u> | | | | |
| SURPLUS NON OPERASIONAL | | | | |
| Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar | | | | |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | | | |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | | |
| Jumlah Surplus Non Operasional | | | | |
| DEFISIT NON OPERASIONAL | | | | |
| Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar | | | | |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | | | |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | | |
| Jumlah Defisit Non Operasional | | | | |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | | | |
| <u>POS LUAR BIASA</u> | | | | |
| PENDAPATAN LUAR BIASA | | | | |
| Pendapatan Luar Biasa | | | | |
| Jumlah Pendapatan Luar Biasa | | | | |
| BEBAN LUAR BIASA | | | | |
| Beban Luar Biasa | | | | |
| Jumlah Beban Luar Biasa | | | | |
| POS LUAR BIASA | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT LO | | | | |

V. Laporan Arus Kas

- 1) LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 2) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris.
 - a) Aktivitas Operasi
 - (1) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

- (2) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:
 - (a) Penerimaan Pajak Daerah;
 - (b) Penerimaan Retribusi Daerah;
 - (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - (d) Penerimaan Transfer;
 - (e) Penerimaan Hibah;
 - (f) Penerimaan Dana Darurat; dan
 - (g) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Tidak Terduga.
 - (3) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :
 - (a) Belanja Pegawai;
 - (b) Belanja Barang dan Jasa;
 - (c) Belanja Bunga;
 - (d) Belanja Subsidi;
 - (e) Belanja Hibah;
 - (f) Belanja Bantuan Sosial
 - (g) Belanja Lain-lain/Tidak Terduga; dan
 - (h) Belanja Transfer.
- b) **Aktivitas Investasi**
- (1) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
 - (2) Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - (a) Penjualan Aset Tetap; dan
 - (b) Penjualan Aset Lainnya.
 - (3) Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - (a) Perolehan Aset Tetap; dan
 - (b) Perolehan Aset Lainnya.
- c) **Aktivitas Pembiayaan**
- (1) Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
 - (2) Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
 - (a) penerimaan Utang Luar Negeri;
 - (b) penerimaan Utang Obligasi;
 - (c) pencairan Dana Cadangan;
 - (d) penerimaan Divestasi;
 - (e) penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas;
 - (f) penerimaan kembali pinjaman kepada Pemerintah Daerah; dan
 - (g) penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Negara.

- (3) Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain
 - (a) pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
 - (b) pembayaran Pokok Utang Obligasi;
 - (c) pembentukan Dana Cadangan;
 - (d) penyertaan Modal Pemerintah;
 - (e) pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas;
 - (f) pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah; dan
 - (g) pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.
- d) Aktivitas Transitoris
 - (1) Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan.
 - (2) Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.
 - (3) Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
 - (4) Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran Non Anggaran seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.
- 3) PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.
- 4) Format LAK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang tidak terakomodir dalam format tersebut. Format LAK adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| (Dalam Rupiah) | | |
|---|------|------|
| Uraian | 20X1 | 20X0 |
| ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI | | |
| ARUS MASUK KAS | | |
| Penerimaan Pajak Daerah | | |
| Penerimaan Retribusi Daerah | | |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| Penerimaan Lain - lain PAD yang sah | | |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil | | |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum | | |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik | | |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | | |
| Penerimaan Dana Insentif Daerah | | |
| Penerimaan Dana Otonomi Khusus | | |
| Penerimaan Dana Keistimewaan | | |
| Penerimaan Dana Desa | | |
| Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi | | |
| Penerimaan Bantuan Keuangan | | |
| Penerimaan Hibah | | |
| Penerimaan Dana Darurat | | |
| Penerimaan dari Pendapatan Lainnya | | |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | |
| ARUS KELUAR KAS | | |
| Pembayaran Pegawai | | |
| Pembayaran Barang dan Jasa | | |
| Pembayaran Bunga | | |
| Pembayaran Subsidi | | |
| Pembayaran Belanja Hibah | | |
| Pembayaran Belanja Bantuan Sosial | | |
| Pembayaran Tak Terduga | | |
| Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | | |
| Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi | | |
| Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | | |
| Jumlah Arus Keluar Kas | | |
| Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi | | |
| ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI | | |
| ARUS MASUK KAS | | |
| Pencairan Dana Cadangan | | |
| Penjualan atas Tanah | | |
| Penjualan atas Peralatan dan Mesin | | |
| Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | |
| Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| Penjualan Aset Tetap Lainnya | | |
| Penjualan Aset Lainnya | | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan | | |
| Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | | |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | |

| | | |
|---|--|--|
| ARUS KELUAR KAS | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | | |
| Perolehan Tanah | | |
| Perolehan Peralatan dan Mesin | | |
| Perolehan Gedung dan Bangunan | | |
| Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya | | |
| Perolehan Aset Lainnya | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | |
| Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | | |
| Jumlah Arus Keluar Kas | | |
| Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi | | |
| ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN | | |
| ARUS MASUK KAS | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) | | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | |
| ARUS KELUAR KAS | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) | | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| Jumlah Arus Keluar Kas | | |
| Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan | | |
| ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS | | |
| ARUS MASUK KAS | | |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | |
| ARUS KELUAR KAS | | |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| Jumlah Arus Keluar Kas | | |
| Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris | | |
| Kenaikan/Penurunan Kas | | |
| Saldo Awal Kas | | |
| Saldo Akhir Kas | | |